



Fahrizal
 Taufiqurrachman¹
 Arik Wahyu Pratama²
 Devi Aria Nanda³

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PROVINSI BALI

Abstrak

Penelitian ini mengangkat permasalahan perihal penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali yang mengalami fluktuasi sehingga dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui peranan PAD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam mendukung implementasi kinerja keuangan daerah yang berkelanjutan pada periode tersebut untuk mendukung terlaksananya otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian data kuantitatif yang bersumber dari portal APBN kementerian keuangan pada sub bagian APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Bali dengan 5 metode analisis yaitu derajat desentralisasi keuangan, kemandirian keuangan daerah, ketergantungan keuangan daerah, efektivitas keuangan daerah dan efisiensi keuangan daerah yang disertai dengan masing-masing kategorinya pada periode 2016-2022. Alat analisis menggunakan microsoft excel 2021. Pada hasil Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) menunjukkan kategori rata-rata sangat baik, kemandirian keuangan daerah menunjukkan kategori rata-rata tinggi sehingga membentuk pola hubungan delegatif dengan pemerintah pusat, ketergantungan keuangan daerah menunjukkan kategori rata-rata tinggi, efektivitas keuangan daerah menunjukkan kategori rata-rata sangat efektif dan efisiensi keuangan daerah menunjukkan rata-rata tidak efisien

Kata Kunci: Derajat Desentralisasi Fiskal, Kinerja Keuangan Daerah, APBD

Abstract

This study raises issues regarding the decline in Regional Original Revenue (PAD) of Bali Province which has fluctuated so that research is carried out which aims to determine the role of PAD as a source of regional income in supporting the implementation of sustainable regional financial performance in that period to support the implementation of regional autonomy. This study uses quantitative data research methods sourced from the Ministry of Finance's APBN portal in the APBD (Regional Revenue and Expenditure Budget) sub-section of Bali Province with 5 analysis methods, namely the degree of financial decentralization, regional financial independence, regional financial dependence, regional financial effectiveness and regional financial efficiency accompanied by each category in the 2016-2022 period. The analysis tool uses Microsoft Excel 2021. In the results the Degree of Fiscal Decentralization (DDF) shows a very good average category, regional financial independence shows a high average category so that it forms a delegative relationship pattern with the central government, regional financial dependence shows a high average category, regional financial effectiveness shows a very effective average category and regional financial efficiency shows an inefficient average.

Keywords: Degree of Fiscal Decentralization, Regional Financial Performance, APBD.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah akan membutuhkan sumber pendanaan (anggaran) yang akan mendukung tercapainya tujuan dan keberhasilan dari otonomi daerah yang berasal dari pendapatan daerah tersebut maupun bantuan dari pemerintah pusat (Abdullah & Hasan, 2022). Kewenangan yang diperoleh daerah dalam mengelola keuangan daerah menjadi bagian dari implementasi dari otonomi daerah serta kemampuan daerah dalam rangka mengelola APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) menjadi bagian dari tolak ukur kinerja keuangan daerah yang telah dilakukan pada periode tersebut (Zukhri, 2020). Kebebasan

^{1,2,3}Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Bojonegoro
 fahrizaltaufiqurrachman@gmail.com

daerah diberi hak mandiri perihal merancang dan mengimplementasikan kebijakan fiskal dalam mengelola keuangan daerah yang dapat dilihat dalam penyusunan APBD (Nurhayati et al., 2022). Salah instrument dalam melihat pengelolaan pemerintahan daerah yaitu kinerja keuangan daerah dalam mengelola dan mengalokasikan segala sumber daya keuangan yang dimiliki guna mencapai tujuan dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat (Haerani & Munandar, 2022).



Gambar 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali
 Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Provinsi Bali secara administrasi daerah menjadi bagian daerah yang terkategori daerah otonom, maka berkewajiban dalam mensukseskan implementasi peraturan otonomi daerah. Provinsi Bali akan dituntut untuk mencari penghasilan secara mandiri dengan memaksimalkan potensi yang akan disesuaikan dengan kondisi masyarakat, budaya, alam dan teknologi yang berada di daerah tersebut. Pada gambar 1 diatas menunjukkan tren PAD Provinsi Bali yang mengalami puncak pendapatan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 4.023,16 miliar, namun mengalami penurunan tahun 2020 sebesar 3.069,47 miliar atau berkurang sebesar 131.07 persen dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Pada tahun berikutnya pasca pandemi covid-19 menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat kembali menggeliat baik dari sisi konsumsi, produksi dan distribusi barang sehingga daerah tersebut mengalami peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) bahkan mendekati pendapatan sebelum pandemi covid sebesar 3.862,88 miliar.

Berdasarkan gambar 1, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Provinsi Bali dalam menunjang pembiayaan (anggaran) kebijakan dan program pemerintah Provinsi Bali pada periode 2016–2022 diantaranya desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan, ketergantungan keuangan, efektivitas keuangan dan efisiensi keuangan daerah. Manfaat penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi bagi pemangku kebijakan Provinsi Bali sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan daerahnya serta bagi para akademisi menjadi sumber untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

METODE

Pada penelitian analisis kinerja keuangan daerah menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif, dimana sumber data berasal dari portal data APBD kementerian keuangan pada rentan waktu 2016-2022. Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya derajat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah, ketergantungan keuangan daerah, efektivitas keuangan daerah dan efisiensi keuangan daerah. Pada penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu Microsoft Excel 2021.

1. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal menunjukkan peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi peranan PAD terhadap total pendapatan maka daerah tersebut telah mensukseskan program desentralisasi keuangan daerah, sedangkan kategori penilaian derajat desentralisasi fiskal dapat dilihat pada tabel 1 (Susilawati et al., 2018).

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1 Kategori Skala interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal	Kategori
0.00 - 10.00	Sangat Kurang
10.01 - 20.00	Kurang
20.01 - 30.00	Cukup
30.01 - 40.00	Sedang
40.01 - 50.00	Baik
lebih dari 50.00	Sangat Baik

2. Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah kemampuan daerah dengan memaksimal peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dalam pembangunan daerah dibandingkan dengan bantuan transfer dari pemerintah dalam skema dana perimbangan yaitu dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), sedangkan kategori penilaian kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 2 (Oki et al., 2020)

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Transfer Pemerintah}} \times 100\%$$

Tabel 2 Kategori Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan

Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan	Kategori	Pola Hubungan
0% - 25%	Rendah Sekali	Instruktif
25% - 50%	Rendah	Konstruktif
50% - 75%	Sedang	Partisipatif
75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Pola Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan daerah.

- a. Pola Hubungan Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan dan sangat mengintervensi kepada daerah yang tingkat kemandiriannya sangat rendah sekali dimana daerah tersebut tidak mampu memaksimalkan potensi daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD). Bagi daerah yang tidak mampu melaksanakan dan mengatur otonomi daerah secara finansial (keuangan) harus mengikuti seluruh rekomendasi kebijakan pemerintah pusat.
- b. Pola Hubungan Konsultatif yaitu peranan pemerintah pusat dalam bantuan dana (transfer) kepada pemerintah daerah sudah mulai berkurang dikarenakan pemerintah daerah telah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga pemerintah pusat hanya akan memberikan konsultasi perihal penyesuaian kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan yang berkelanjutan.
- c. Pola Hubungan Partisipatif yaitu peranan pemerintah pusat dalam bantuan keuangan kepada pemerintah daerah akan semakin berkurang dikarenakan jumlah pendapatan asli daerah yang terus meningkat bahkan mendekati jumlah transfer pemerintah sehingga peran pemerintah pusat yang sebelumnya memberikan konsultasi kemudian beralih pada peran partisipasi.
- d. Pola Hubungan Delegatif yaitu peranan pemerintah pusat dalam memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah sudah sangat sedikit bahkan bisa dikatakan tidak perlu mendapatkan transfer lagi. Kondisi ini disebabkan pemerintah daerah telah mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) melebihi jumlah transfer pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah pusat dengan yakin akan mendelegasikan secara penuh dalam otonomi keuangan kepada pemerintah daerah, bahkan seringkali daerah tersebut menjadi percontohan untuk daerah lainnya.

3. Ketergantungan Keuangan Daerah

Ketergantungan fiskal daerah menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat. Rasio ini diperoleh dengan membagi pendapatan transfer dengan pendapatan total daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, sedangkan kategori penentuan ketergantungan fiskal daerah dapat dilihat pada tabel 3 (Kamaroellah, 2017).

$$\text{Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Total Transfer Pemerintah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3 Kategori Skala Interval Rasio Ketergantungan Keuangan

Skala Interval Rasio Ketergantungan Keuangan	Kategori
0.00 - 10.00	Sangat Rendah
10.01 - 20.00	Rendah
20.01 - 30.00	Cukup
30.01 - 40.00	Sedang
40.01 - 50.00	Tinggi
lebih dari 50.00	Sangat Tinggi

4. Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas keuangan daerah menunjukkan sejauh mana peningkatan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada suatu daerah dengan cara membandingkan realisasi PAD dengan target PAD yang sudah dianggarkan pada awal periode, sedangkan kategori penentuan efektivitas keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 4 (Harahap, 2020).

$$\text{Efektivitas Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Tabel 4 Kategori Skala Interval Efektivitas Keuangan

Persentase Efektivitas Keuangan	Kategori
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

5. Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan sejauh mana tingkat efisiensi penggunaan realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan seluruh total pendapatan daerah, sedangkan kategori penentuan efisiensi keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 5 (Rahman & Saputra, 2022).

$$\text{Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Total Belanja Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5 Kategori Skala Interval Efisiensi Keuangan

Persentase Efisiensi Keuangan	Kategori
Lebih dari 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Derajat Desentralisasi Fiskal

Kinerja keuangan desentralisasi fiskal provinsi Bali tahun 2016-2022 pada tabel 6 menunjukkan hasil sangat baik, kondisi ini mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) mampu menopang dan berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap total pendapatan daerah secara berkelanjutan. Meskipun mengalami penurunan pada periode 2020-2021 yang diakibatkan oleh pembatasan aktivitas masyarakat pada masa pandemi covid-19 menyebabkan penyerapan pajak dan retribusi daerah mengalami penurunan serta pembatasan masuknya wisatawan mancanegara di provinsi Bali juga berpengaruh terhadap sektor umkm, namun meskipun mengalami penurunan tidak berdampak signifikan dimana masih mendapatkan kategori sangat baik.

Mengalami pemulihan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2022 dikarenakan pandemi covid-19 sudah mulai mereda dan masyarakat kembali beraktivitas serta kembali akses internasional sehingga wisatawan mancanegara bisa kembali mamsuki Provinsi Bali. Terjadi lonjakan perekonomian di provinsi Bali sehingga pemerintah mendapatkan momentum untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) bahkan mampu melampaui ketika sebelum terjadinya pandemi covid-19.

Tabel 6 Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Bali

Tahun	Derajat Desentralisasi Fiskal	
	Hasil	Kategori
2016	57.94	Sangat Baik
2017	56.72	Sangat Baik
2018	59.41	Sangat Baik
2019	60.54	Sangat Baik
2020	53.68	Sangat Baik
2021	52.63	Sangat Baik
2022	65.42	Sangat Baik
Rata-Rata	58.05	Sangat Baik

Sumber: Data diolah (2024)

2. Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui rasio efisiensi dengan membandingkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan bantuan transfer dari pemerintah pusat, jika persentase semakin tinggi maka diasumsikan pendapatan asli daerah telah mampu berkontribusi secara optimal sebagai sumber pendapatan yang langsung berasal dari kemampuan daerah tersebut sehingga semakin meningkatkan kemandirian Provinsi Bali dalam mengelola keuangan daerahnya sehingga akan membentuk pola hubungan delegatif antara pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat. Kinerja kemandirian keuangan daerah provinsi Bali tahun 2016-2022 dapat dilihat pada tabel 7, sebagai berikut:

Tabel 7 Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali

Tahun	Kemandirian Keuangan Daerah		
	Hasil	Kategori	Pola Hubungan
2016	162.46	Tinggi	Delegatif
2017	133.61	Tinggi	Delegatif
2018	146.66	Tinggi	Delegatif
2019	153.76	Tinggi	Delegatif
2020	116.13	Tinggi	Delegatif
2021	111.28	Tinggi	Delegatif
2022	189.61	Tinggi	Delegatif
Rata-Rata	144.79	Tinggi	Delegatif

Sumber: Data diolah (2024)

3. Ketergantungan Keuangan Daerah

Implementasi otonomi daerah dijadikan salah satu indikator keberhasilan daerah yaitu kemampuan daerah dalam membiayai segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan melihat tingkat ketergantungan keuangan daerah. Pada tabel 8 menunjukkan hasil tingkat ketergantungan keuangan daerah provinsi bali selama periode 2016-2022 yaitu berada pada ketagori sedang dan tinggi, kondisi mengindikasikan bahwa pemerintah provinsi bali masih sangat bergantung pada bantuan dana transfer dari pemerintah pusat dalam menjalankan kebijakan dan program pemerintahannya.

Tabel 8 Ketergantungan Keuangan Daerah Provinsi Bali

Tahun	Ketergantungan Keuangan Daerah	
	Hasil	Kategori
2016	35.66	Sedang
2017	42.45	Tinggi
2018	40.51	Tinggi
2019	39.37	Sedang
2020	46.22	Tinggi
2021	47.29	Tinggi
2022	34.50	Sedang
Rata-Rata	40.86	Tinggi

Sumber: Data diolah (2024)

Permasalahan tingginya tingkat ketergantungan keuangan daerah Provinsi Bali disebabkan oleh kurang optimalnya penyerapan pajak dan retribusi daerah serta label provinsi Bali sebagai pusat destinasi wisata mancanegara no 1 di Indonesia mengharuskan pemerintah untuk lebih memfokuskan pada pengembangan dan peningkatan pelayanan destinasi wisata sehingga akan berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan perkapita pengusaha umkm di Provinsi Bali sekaligus meningkatkan pendapatan cadangan devisa negara dalam bentuk mata uang asing.

4. Efektivitas Keuangan Daerah

Efektivitas keuangan daerah provinsi Bali dihitung dengan menggunakan perbandingan antara realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan target pendapatan asli daerah (PAD) yang tahun 2016-2022 dapat dilihat pada tabel 10. Perhitungan rasio keuangan ini bertujuan untuk melihat kemampuan daerah dalam menyusun target anggaran PAD serta dalam

merealisasikannya pada periode tersebut. Berikut tabel 9 menunjukkan perkembangan efektivitas keuangan daerah Provinsi Bali pada periode 2016 – 2022 sebagai berikut:

Tabel 9 Efektivitas Keuangan Daerah

Tahun	Efektivitas Keuangan Daerah	
	Hasil	Kategori
2016	90.00	Cukup Efektif
2017	104.55	Sangat Efektif
2018	111.06	Sangat Efektif
2019	112.14	Sangat Efektif
2020	81.58	Kurang Efektif
2021	98.13	Cukup Efektif
2022	128.76	Sangat Efektif
Rata-Rata	103.75	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan data pada tabel 9 diatas menunjukkan bahwa rasio efektivitas keuangan daerah mengalami fluktuasi setiap tahunnya, namun secara keseluruhan efektivitas keuangan daerah Provinsi Bali rata-rata pada posisi kriteria Sangat Efektif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya dalam memaksimalkan potensi PAD dapat dioptimalkan melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

5. Efisiensi Keuangan Daerah

Kinerja efisiensi keuangan daerah provinsi Bali tahun 2016-2022 dapat dilihat pada tabel 10, sebagai berikut:

Tabel 10 Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi Bali

Tahun	Efisiensi Keuangan Daerah	
	Hasil	Kategori
2016	103.28	Tidak Efisien
2017	101.31	Tidak Efisien
2018	95.83	Kurang Efisien
2019	98.09	Kurang Efisien
2020	111.19	Tidak Efisien
2021	105.87	Tidak Efisien
2022	114.29	Tidak Efisien
Rata-Rata	104.26	Tidak Efisien

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui rasio efisiensi dengan membandingkan realisasi belanja daerah dengan realsiasi pendapatan daerah, jika persentase semakin tinggi maka diasumsikan total pendapatan tidak mampu memenuhi segala kebutuhan belanja daerah dan sebaliknya. Rasio efisiensi keuangan daerah Provinsi Bali selama rentan waktu 2016-2022 memiliki rata-rata diatas 100 persen, kondisi ini mengindikasikan bahwa seluruh pendapatan dalam APBD tidak mampu menutupi segala pembiayaan (belanja) daerah pada periode tersebut.

SIMPULAN

Kesimpulan hasil penelitian ini telah menunjukkan analisis kinerja keuangan Provinsi Bali selama periode 2016-2022 dimana pertama, Derajat desentralisasi fiskal provinsi Bali menunjukkan hasil sangat baik. Kedua, Kemandirian keuangan daerah provinsi Bali menunjukkan hasil tinggi sehingga menunjukkan pola hubungan delegatif dengan pemerintah

pusat. Ketiga, Ketergantungan keuangan daerah provinsi Bali menunjukkan hasil tinggi. Keempat, Efektivitas keuangan daerah provinsi Bali menunjukkan hasil sangat efektif. Kelima, Efisiensi keuangan daerah provinsi Bali menunjukkan hasil tidak efisien. Penelitian ini diharapkan mengalami perkembangan wilayah dan metode analisis lanjutan sehingga harapan bagi peneliti selanjutnya bisa dilanjutkan pada wilayah administrasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali serta menggunakan analisis ekonometrika dengan keterkaitan kinerja keuangan sebagai variabel bebas dan terikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J., & Hasan, W. (2022). Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(2), 208–213.
- Haerani, N., & Munandar, A. (2022). Analisa kinerja keuangan pada pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2016-2020. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 10(1), 1–8.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34–38.
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. *Nuansa*, 14(1), 124–138.
- Nurhayati, N., Jubaedah, J., & Mulyantini, S. (2022). Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(7), 10196–10211.
- Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 1–6.
- Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 22(2), 117–126.
- Susilawati, D., Wardana, L. K., & Rahmawati, I. F. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 91–98.
- Zukhri, N. (2020). Kinerja keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari derajat kemandirian, ketergantungan, dan desentralisasi fiskal. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143–149.